

## **DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 DI KANTOR URUSAN AGAMA ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG**

Noviana

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: [Noviana\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Noviana_uin@radenfatah.ac.id)

Siti Rochmiyatun

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: [sitirochmiyatun\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id)

Yuswalina

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: [yuswalina\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yuswalina_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract**

*Based on Article 5 of Government Regulation Number 19 of 2015 regarding Tariffs for Non-Tax State Revenue in Marriage Registration Services and referrals that are clearly regulated with 2 (two) options of Rp. 0, - (not Rupiah) free or free of charge at all, if the process of implementing the marriage contract at the KUA and the working hours of the KUA and if it is done outside of the KUA and outside of working hours, a fee may be charged is Rp.600,000 (six hundred thousand rupiah). The research problem that will be discussed is to determine the Implementation and Impact of Article 5 of Government Regulation Number 19 of 2015 regarding Tariffs for Non-Tax State Revenue for the Ilir Barat II community and a Review of Islamic Law on Article 5 of Government Regulation Number 19 of 2015. The research method used is normative and empirical approach. The data used in primary and secondary data are from field research and library research. Then the data is processed systematically and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Implementation of Article 5 of Government Regulation Number 19 of 2015 includes the socialization of the maximum marriage fee regulations carried out by the KUA Ilir Barat II District and has been responded well by the community including the cost of marriage which is clearly regulated with 2 (two) regulated choices. Reviewed from Islamic Law, the government's policy in eliminating the practice of gratification among upstream elements has been considered to go well with the existence of Government Regulation Number 19 of 2015 regarding Tariffs on Types of State Revenue Not in Marriage Registration Services.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Registration, Cost of Marriage Registration*

## Pendahuluan

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah ibadah. Orang mukmin yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala, sepanjang niatnya ikhlas, kemauannya benar dan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan haram, tidak didorong oleh nafsubirahi semata. Pernikahan yang diserukan Islam adalah bagian dari naluri manusia dan merupakan sunnah para nabi dan rasul. pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi.

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S: An-Nur ayat 32 Berdasarkan ayat tersebut, Allah juga menjelaskan bahwa menikah adalah suatu yang sangat disukai oleh-Nya. Allah juga memerintahkan untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut, karena pernikahan merupakan suatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhi diri dan mencegah dari perbuatan zina, Ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan

yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu yang bersifat fasilitas maupun tidak<sup>1</sup>

Menurut Fuqaha menyebutkan bahwa pada nikah diberlakukan hukum yang 5 (lima) sehingga bisa menjadi dalam suatu keadaan hukumnya wajib, pada keadaan lain hukumnya sunnah atau mubah, bahkan terkadang makruh atau haram.<sup>2</sup>

Didalam Al-Quran dan Hadits hanya mengatur substansinya saja, namun hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min Alqur'an Al-karim*, (Beirut dar ibn Abbud. 2004), hlm131

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: CV.Divonegoro. 2017), hlm 359

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>ibid

Akan tetapi, pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai-pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

Untuk melaksanakan pernikahan tidak terlepas dari biaya pencatatan nikah. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Persyaratannya adalah membayar biaya pencatat nikah, karenanya negara Indonesia adalah negara hukum negara yang berdiri atas Hukum dan menjamin bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan sudah ditentukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah yang sudah diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk. Berdasarkan latar belakang itulah maka penulis tertarik akan mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana dikhususkan mengenai jenis tarif

terhadap biaya nikah di lingkungan KUA dan diluar KUA. dan kaitannya dengan animo masyarakat untuk menikah di KUA ataupun diluar KUA.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah Dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang, serta tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

### **Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pencatatan Biaya Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan

<sup>59</sup>Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lampiran Romawi II "Kantor Urusan Agama Kecamatan Per Peristiwa Nikah atau Rujuk Rp.600.000,-"

nikah atau rujuk.

- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Selanjutnya apabila catin ingin memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama dan di luar jam kerja Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya Rp.600.000,.

Untuk pembayarannya

dilakukan oleh calon pengantin atau keluarga calon pengantin itu sendiri dibank, kemudian slip bukti pembayaran itu selanjutnya dibawa ke KUA bersama persyaratan yang lain.

Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Kepala Desa sebagai bukti bahwa catin memang tergolong tidak mampu secara ekonomi maka catin tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali dan/atau korban bencana (kebakaran, gempa, tsunami dan lain sebagainya) bisa melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA maka dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rasmin Iswildi, M.SI selaku kepala KUA Ilir Barat II mengatakan bahwa pelaksanaan penetapan biaya Nikah di KUA pasca berlakunya PP PNPB tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama membawa banyak fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang adalah:<sup>6</sup>

1. Fungsi Perlindungan Hukum. Para pelaksana teknis di KUA, baik kepala, penghulu maupun pelaksana KUA merasa aman dari tuduhan gratifikasi atau pungli yang

<sup>610</sup>Hasil wawancara dengan Kepala KUA Ilir Barat II, 14 Juni 2019

selama ini menderanya. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini benar-benar menjadi payung hukum terhadap penarikan biaya dari masyarakat untuk pelayanan nikah di luar Kantor KUA.

2. Fungsi Pembangunan Citra KUA. Penerapan PP PNBPN dengan disiplin dan benar, akan meningkatkan citra KUA dari berbagai image miring, sebab, apapun yang ditentukan dalam peraturan pemerintah itu telah mempunyai kekuatan hukum yang maksimal. Sehingga biaya transportasi dan jasa profesi yang selama ini dinilai ilegal kini telah menjadi legal, menjadi pungutan resmi dalam bentuk PNBPN dan bukan lagi dianggap gratifikasi atau pungutan liar seperti yang dituduhkan selamaini.
3. Fungsi Keadilan. Aspek keadilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan PP PNBPN. Pernikahan atau diluar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menompang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Sedangkan akad nikah di kantor pada jam dinas karena tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya, maka tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal ini demikian merupakan wujud keadilan

dalam pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani ataupun para pelaksana di KUA sebagai petugas pelayan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang langkah KUA setelah menerima perintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu segera melaksanakan rangkaian tindakan yang telah diatur dengan aturan-aturan PP PNBPN tersebut. Dan berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Ilir Barat II juga mengatakan bahwa salah satu bagian dari kegiatan kepenghuluan di KUA Kecamatan Ilir Barat II dilaksanakan dalam bentuk pelayanan nikah. Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi leading sektor KUA bahwa pelaksanaan penetapan biaya nikah di KUA pasca berlakunya PP PNBPN tentang Taris atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama implementasi berjalan maksimal dan supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan kepada petugas pendaftaran di KUA dan penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan dilapangan serta KUA.

### **Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

Masyarakat kecamatan Ilir Barat II yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan pencatatan nikah pada sekitar Januari-Desember 2013 dan Januari-Agustus 2019, dari hasil wawancara pengamatan masyarakat Ilir Barat II serta penelitian data yang ada di KUA Ilir Barat II diperoleh beberapa hal yang digambarkan sebagai dampak dari pelaksanaan PP PNBPN bagi masyarakat Ilir Barat II Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Analisis Legalitas. Lahirnya PP PNBPN, muncul dari sikap "ikhlas beramal" sebagai pradigama berfikir Kementrian Agama agar dijadikan pertimbangan legalyuridis, terutama mengenai aspek keuangan. Antisipasi jangka panjang yang jeli dan strategis dalam penyusunan materi-materi hukum dan peraturan, mestinya harus dilakukan dengan seksama, dan tidak reaktif seperti dewasa ini terjadi.
2. Analisis Efektivitas dan Kepuasan Publik. Adanyan PP PNBPN yang telah resmi dilakukan, makadiharapkan adanya integritas dalam bentuk disiplin kerja petugas teknis di KUA sehingga mendukung program pemerintah dalam gerakan anti gratifikasi dan pungutan liar.
3. Analisis Terhadap Dampak dari Implementasi atas Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian di KUA Ilir Barat II, dampak dari pelaksanaan atas PP PNBPN dapat dilihat dari data statistik masyarakat yang melangsungkan pernikahan di KUA sebanyak 26 catin yang melangsungkan pernikahan di KUA pada bulan Januari sampai Agustus 2019. Dan sebelum adanya PP Nomor 19 tahun 2015 biaya nikah Rp.30.000 yang ditetapkan oleh PP Nomor 47 tahun 2004dan tidak mengatur biaya nikah jika dilakukan di luar balai nikah maka dari itu mayoritas masyarakat memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dengan memberi uang tambahan tanpa adanya aturan yang mengatur tentang biaya nikah di luar KUA.

Kondisi seperti ini timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat jika meminta uang tambahan tentu menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk datang kelokasi pernikahan apabila lokasi pernikahan sangat jauh dan dilakukan dimalam hari. Demikian

berdasarkan data tersebut, masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang secara umum menanggapi secara mendalam tentang peraturan dan tata Perundang-undangan yang menyangkut biaya pernikahan. Dimana sosialisasi PP PNPB yang dilakukan KUA Ilir Barat II Kota Palembang direspon baik oleh masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian pada KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, maka diperoleh data mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan di KUA dan perkawinan yang dilangsungkan diluar KUA Kecamatan Ilir Barat II sebagai berikut:

Tabel I:  
Data Perkawinan di KUA Kecamatan Ilir Barat II  
Kota Palembang Tahun 2013

NO	Satuan Organisasi Kelurahan	Perkawinan Di KUA	Perkawinan diluar KUA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
1	Kelurahan 27		34	Rp. 1.020.000
2	Kelurahan 28		38	Rp. 1.140.000
3	Kelurahan 29		33	Rp. 990.000
4	Kelurahan 30		47	Rp. 1.410.000
5	Kelurahan 32		50	Rp. 1.500.000
6	Kelurahan 35		36	Rp.1.080.000
7	Kemang Manis		29	Rp.870.000
8	Balai Nikah Kecamatan Ilir Barat II	2	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>265</b>	<b>Rp. 8.010.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>Rp. 8.010.000</b>	

Tabel II  
Data Perkawinan di KUA Kecamatan Ilir Barat II  
Kota Palembang Tahun 2019

NO	Satuan Organisasi Kelurahan	Perkawinan Di KUA	Perkawinan diluar KUA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
1	Kelurahan 27		18	Rp. 10.800.000
2	Kelurahan 28		17	Rp. 10.200.000
3	Kelurahan 29		23	Rp. 13.800.000
4	Kelurahan 30		47	Rp. 28.200.000
5	Kelurahan 32		50	Rp. 30.000.000
6	Kelurahan 35		26	Rp.15.600.000
7	Kemang Manis		19	Rp.11.400.000
8	Balai Nikah Kecamatan Ilir Barat II	26		-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>200</b>	<b>Rp. 120.000.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>Rp.120.000.000</b>	

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan didalam KUA dan perkawinan yang dilangsungkan di luar KUA Kecamatan Ilir Barat II dari bulan Januari-Agustus 2019 sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) pelaksana perkawinan, dimana pemasukan Negara dari PNPB yang berlaku diKementrian Agama sangat besar dibandingkan dengan sebelum ditetapkan PP Nomor Tahun 2015 mempertegas PP Nomor 48 tahun 2014. Dan juga terbukti dengan adanya PP Nomor 19 tahun 2015 jumlah masyarakat atau catin yang menikah di KUA meningkat lebih banyak dibandingkan sebelum adanya PP Nomor 19 tahun 2015.

Pada tahun 2013 hanya 2 pasang catin yang menikah di KUA (lihat tabel I) dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 26 pasang catin yang menikah di KUA (lihat tabel II) setelah adanya PP Nomor 19 tahun 2015 ini dikarenakan jika memilih menikah di KUA tidak dikenakan biaya sama sekali dengan adanya PP PNPB inilah juga dapat menolong masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Ilir Barat II juga menjelaskan bahwa dampak dari PP PNPB bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya Ilir Barat II sebagai berikut:

### **Biaya Nikah**

Sebagai masyarakat menyatakan kepuasannya setelah pernikahan diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan. Pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan diKUA pada jam kerja dan bagi korban bencana banjir, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan diluar KUA, dimana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Adanya kepastian tarif tentang biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan ketidakraguan terhadap masyarakat sebelum diterapkannya PP Nomor 19 tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Ilir Barat II bahwa masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan dibulan Januari- Agustus 2019 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Ilir Barat II relatif terjangkau. Dengan adanya ketentuan PP PNPB yang substansinya adalah merubah biaya pencatatan nikah menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

### **Tempat Pelaksanaan Nikah**

Mengenai tempat pelaksanaan diatur dalam ketentuan di PP PNPB menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan diluar KUA. Diluar KUA maksudnya dilaksanakan di



rumah, di gedung, masjid, ataupun tempat lain yang dianggap paling baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah PNBP bagi masyarakat Kota Palembang khususnya masyarakat Ilir Barat II setelah diwawancari selama penelitian, masyarakat tersebut merespon baik dan tidak keberatan dengan diterapkannya PP Nomor 19 tahun 2015 tersebut, karena sangat membantu bagi orang-orang atau calon pengantin yang tergolong tidak mampu dan korban bencana banjir untuk melaksanakan pernikahan karena kendala biaya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina, hamil di luar nikah dan lain-lain. dengan adanya PP PNBP masyarakat bisa memilih apakah ingin melaksanakan pernikahan di luar KUA yang dikenakan biaya nikah RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang relatif terjangkau dan mereka jugabisa memilih untuk melaksanakan nikah di KUA dan jam kerja KUA Rp.0,- (nol rupiah) karena tidak dikenakan biaya nikah.

Selama penelitian penulis meneliti jumlah calon pengantin yang telah melaksanakan pernikahan di KUA dan di luar KUA pada bulan Januari-Agustus 2019. Dan terbukti dengan adanya PP PNBP tersebut membuat masyarakat mudah untuk melaksanakan pernikahan.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015**

Allah menciptakan hamba-Nya berpasan-pasangan. Hal itu adalah sesuatu yang alami yaitu pria tertarik kepada wanita begitupun sebaliknya. Dari saling tertarik itulah terjadi niat untuk menuju jenjang suatu perkawinan. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah SWT.<sup>7</sup> Allah SWT menjelaskan dengan firman-Nya pada Al-Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

Perkawinan ini berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) yang dalam bahasa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami istri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidon* tersebut menjadi tugas para mujtahid disepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau al Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan.<sup>8</sup>

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan

<sup>711</sup>Ahmad rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo.1998), hlm 107

<sup>8</sup>H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka amani. 2002), hlm 80

penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian pernikahan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjagaterdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak<sup>9</sup> yaitu berlaku pada departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan Rujuk pada KUA sebesar Rp 30.000<sup>9</sup>

Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat, karena PP (Peraturan Pemerintah) tersebut tidak mengatur bagi penghulu jika pernikahan dilaksanakan diluar balai nikah. Kondisi seperti itu sangat dilematis bagi penghulu, jika meminta uang tambahan tentu menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk datang ke lokasi pernikahan. Apabila lokasi pernikahan sangat jauh dan dilaksanakan malam hari.

Dengan demikian langkah antisipasi telah diupayakan Oleh Menteri Agama dengan memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan biaya

transportasi bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mengawasi atau menghadiri pernikahan diluar balai nikah yang dikenal dengan uang tambahan namun tetap saja menjadi masalah jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor dan diluar jam kerja, karena menurut PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terlalu kecil. Apalagi regulasi mengenai uang *bedolan* tersebut sudah dihapus sejak tahun 2006.

Persoalan nikah di luar jam kerja telah mencapai titik klimaks. Reaksi mayoritas penghulu di Indonesia mengambil sikap untuk tidak melayani pelaksanaan nikah di luar balai nikah dan di luar jam kerja. Walaupun keluarga calon kedua pengantin/mempelai memberikan sekedar uang transport dan penghulu menikmati maka termasuk kategori gratifikasi.

Karena dikhawatirkan muncul permasalahan karena penghulu dianggap telah melakukan gratifikasi. Seakan membuka mata pengambil kebijakan baik internal Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya. Pengambil kebijakan harus mempertimbangkan perbaikan dalam pelayanan nikah dan rujuk, karena pemungutan biaya oleh Kepala KUA diluar Peraturan Pemerintah Nomor 47 tersebut merupakan gratifikasi.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya dan dengan perkembangan zaman Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen

<sup>9</sup>eraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Agama, maka pada tanggal 10 juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. "Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan diluar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,

Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah)".<sup>16</sup> Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah PNPB disambut dengan hangat oleh masyarakat

dan pihak KUA Kota Palembang khususnya. Agar terhindar dari tuduhan gratifikasi, dan tentunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah PNPB maka akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA ataupun di luar KUA. Kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktik gratifikasi dikalangan oknum Negara Bukan Pajak dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk yang mengatur biaya pernikahan di luar KUA dan didalam KUA. Langkah yang paling tepat diambil oleh Negara dalam realitanya adalah perkawinan harus melalui prosedur (undang-undang yang berlaku dalam negara) lebih khusus lagi pencatatan nikah merupakan langkah yang strategis untuk mencapai kemaslahatan rakyat yaitu dengan terlindungnya setiap individu penyelewengan salah satu pihak. Inilah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dikaitkan sesuai dengan kaidah usul fikih yang Artinya: "*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*"<sup>10</sup>

Dari kaidah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak mempunyai otoritas (pemerintah) pemerintah lebih mengedepankan kemaslahatan umat di dalam membuat kebijaksanaan dibidang

<sup>10</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaiddul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1976), hlm 75. Lihat juga Jalaluddin Abdurrahman as-Syayuthi, *Asybah Wa an-Nazair* (Singapura: Sulaiman Mar'i, tt), hlm 47

apapun, seperti halnya dibidang pencatatan nikah. Hal ini sebagai bentuk untuk menanggulangi hal-hal yang bisa memudharatkan atau menyulitkan salah satu pihak. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk, apabila ditinjau dari segi hukum Islam telah sesuai dengan tujuan dari maqasid al syari'ah yaitu menjaga harta. Karena sebelum adanya peraturan ini kemudharatan adalah adanya pungutan liar dan pemasangan tarif pencatatan nikah yang dilakukan oleh oknum penghulu. Maka kemudharatan haruslah dihilangkan. Karena Islam telah mengajarkan cara yang baik agar manusia mencari harta dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT supaya terjaga hartanya dari jalan yang tidak benar.

Kebijakan pemerintah untuk menghilangkan praktek gratifikasi inilah yang tujuannya untuk terpelihara hartanya dari harta haram bagi penghulu atau pegawai pencatat nikah tersebut.

### **Kesimpulan.**

1. Implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama IIR Barat II Kota Palembang yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya yang mana biaya nikah diatur dengan 2 pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA dan jam kerja KUA, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja KUA. Dampak diterapkannya PP Nomor 19 tahun 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah tidak membuat keraguan dan mendapat respon baik dari masyarakat sehingga terlihat perbandingan tahun 2013 sebelum adanya PP PNBP terdapat 2 pelaksanaan perkawinan dan ditahun meningkat lebih banyak menjadi 26 pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di KUA dan jam kerja KUA setelah adanya PP PNBP. Dengan diterapkannya PP PNBP tersebut sangat menolong bagi calon pengantin yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dan juga bagi keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai untuk pelaksanaan perkawinan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama dari

pertimbangan Hukum yang digunakan Pemerintah dalam menetapkan PP Nomor 19 Tahun 2015 apabila ditinjau dari hukum Islam telah sesuai dengan tujuan dari *maqasid al syari'ah* yaitu menjaga harta dari jalan yang tidak benar karena sebelum diterapkannya peraturan kemudhoratan adanya pungutan liar dan pemasangan tariff pencatatan nikah yang dilakukan oleh penghulu. Maka dari itu, pemerintah lebih mengedepankan kemaslahatan umat didalam membuat kebijaksanaan dibidang apapun, seperti halnya dibidang pencatatan nikah. PP Nomor 19 tahun 2015 ini sebagai jalan untuk menanggulangi hal-hal yang bias terjadi. Perlunya mencari berita terbaru akan hal peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara, khususnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

- AliAl-Shabuni, Muhammad, 2004 *Tafsir Ayat al- Ahkam min Alqur'an Al-karim*, Beirut dar ibnabbud.
- Tohaputra, Ahmad, 1999 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

### Buku

- Abidin, Slamet, 1990 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Abdul, 2009 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman, Asmuni, 1976 *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaiddul Fiqhiyah)*, Jakakarta:Bulan Bintang.
- Aminuddin, dan Abidin, Slamet1999 *Fiqh Munakahat*, Bandung: PustakaSetia
- Aziz, Abdul, 2009 *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma PutraUtama.
- Efendi , Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kebayunan: Kencana.
- Al-Hamdani ,H.S.A, 2002 *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka amani.
- Jamali, Abdoel, 2012 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mahali, Mudjab, Ahmad, 2002 *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus.
- Manan, Abdul, 2006 *Aneka Masalah hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Makruf, Jamhari, 2013 *Hukum Keluarga Pidana danBisnis*, Jakarta: Kencana.
- Rafeld, Media, 2016 *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Alike.
- Rasyid, Sulaiman, 2010 *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Rofiq, Ahmad, 1998 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayyid, 2017 *Fiqh Sunnah*, Bandung: CV.Divonegoro.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014 *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Suryabrata, Sunardi, 2007 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Syarifuddin, Amir, 2013 *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Tihami, 2014 *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.